

MODAL SOSIAL, PERSEPSI TENTANG KETERLIBATAN MILITER DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM CITARUM HARUM

SOCIAL CAPITAL, PERCEPTION OF THE MILITARY INVOLVEMENT AND THE SOCIETY PARTICIPATION IN IMPLEMENTATION OF CITARUM HARUM PROGRAM

Muthya Diana¹, Pius Suratman Kartasasmita²

¹BP2D Provinsi Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah Raya No. 6, Bandung 40286

²Program Magister Ilmu Sosial Universitas Parahyangan, Bandung Jl. Ciumbuleuit No.94, Bandung 40141
muthyadianasantoso@gmail.com

ABSTRACT

Citarum River Basin Restoration through the Citarum Harum Program which involves the dominant role of military in its implementation requires community participation. This study aims to determine the level of community participation, to determine the level of social capital and to measure community perceptions on the military in the implementation of the Citarum Harum Program, as well as to see the relation between the three. Surveys with questionnaire as instrument for data collection is used in the study. Descriptive correlational technique is used to analyze the collected data. The results of the analysis conclude that the level of community participation reveals in the low category, the level of social capital at the moderate level, while community perceptions of the military involvement is surprisingly very. The analysis also shows the unexpected positive relationship between both the level of community participation and social capital, as well as between community participation and community perception about the military involvement in Citarum Harum Program. Efforts at improving community participation in the Citarum Harum Program need to be carried out starting from the basic stage, namely the stage of providing information so that it can be a strong foundation in the growth of participation in the next stage by optimizing social capital in the implementation of Citarum Harum Program. Next research on measuring social capital of communities who are living along Citarum River is recommended.

Keywords: Citarum Harum Program, Military Involvement, Society Participation.

ABSTRAK

Restorasi Daerah Aliran Sungai Citarum melalui Program Harum Citarum, yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran militer yang dominan, membutuhkan adanya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat, mengukur tingkat modal sosial, dan mengukur tingkat persepsi masyarakat tentang keterlibatan militer dalam pelaksanaan Program Citarum Harum, serta untuk melihat hubungan antara ketiganya. Penelitian ini menggunakan metoda survey dengan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Analisis data menggunakan teknik analisis korelasional deskriptif. Hasilnya menyimpulkan, bahwa tingkat partisipasi masyarakat tergolong rendah, tingkat modal sosial dalam tingkat sedang, sementara persepsi masyarakat tentang keterlibatan militer secara mengejutkan sangat baik. Analisis juga menunjukkan hubungan positif tak terduga antara partisipasi masyarakat dengan modal sosial dan antara modal sosial dengan persepsi masyarakat tentang keterlibatan militer dalam Program Citarum Harum. Namun tidak diperoleh hubungan antara partisipasi dengan persepsi masyarakat tentang keterlibatan militer. Oleh karena itu, upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Program Citarum Harum perlu dilakukan mulai dari tahap dasar, yaitu tahap pemberian informasi yang dapat menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan partisipasi ditahap selanjutnya dengan mengoptimalkan modal sosial masyarakat dalam implementasi program Citarum Harum. Penelitian selanjutnya merekomendasikan untuk menggali lebih dalam modal sosial masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Citarum sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Program Citarum Harum, Keterlibatan Militer, Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Sungai Citarum dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya telah menjadi perhatian tidak saja di tingkat nasional tetapi juga di tingkat dunia. Berbagai usaha untuk

menangani masalah sudah banyak dilakukan, berbagai program skala besar telah dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Pertama, ada *Program Kali Bersih (PROKASIH)* yang dimulai tahun 1989. Kedua. *Program Citarum Bestari* yang digagas

dan dikomandoi langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014. Ketiga, *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program* (ICWRMIP) yang merupakan usaha kolaboratif yang diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dengan dukungan dana dari Bank Pembangunan Asia (ADB) yang berdurasi dari tahun 2009-2023. Program Citarum Bestari yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianggap cukup berhasil membawa perbaikan Sungai Citarum, paling tidak jika merujuk pada laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat. Dengan menggunakan indikator berkurangnya tumpukan sampah yang menutupi aliran sungai. Pada tahun 2015 sampah yang masuk ke aliran Sungai Citarum kurang lebih mencapai 1.500 ton per harinya. Dengan berbagai langkah dan upaya yang dilakukan, kini jumlahnya sudah jauh berkurang 50 persen. Kesungguhan usaha pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengusung *Program Citarum Bestari* tampak melalui berbagai langkah penertiban yang dilakukan bersama Kodam III Siliwangi dan Polda Jabar terhadap industri yang melakukan pencemaran di Sungai Citarum, dari mulai penutupan pabrik tekstil yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sampai pengusutan perdata dan pidana terhadap perusahaan-perusahaan yang membuang limbah sembarangan, disamping menurunkan sekitar 1.400 tentara untuk melakukan pembersihan sampah di Sungai Citarum.

Pada awal tahun 2018, kebijakan pemerintah untuk merevitalisasi Citarum kembali digelorkan melalui Program Nasional Citarum Harum. Program ini diklaim lebih terintegrasi dengan melibatkan 16 kementerian terkait, TNI dan Polri, dibawah arahan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Implementasinya dikuatkan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kurun waktu tujuh tahun, air dari daerah aliran sungai (DAS) Citarum yang memiliki luas 721.945,66 hektar dapat dijadikan sumber air minum oleh masyarakat.

Belajar dari upaya-upaya sebelumnya yang lebih mengandalkan peran dominan pemerintah yang sering dinilai tidak sepenuhnya berhasil, maka Satuan Tugas (Satgas) Program Citarum Harum lebih mengutamakan strategi pengelolaan kolaboratif (*collaborative governance*). Citarum Harum yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, menerapkan model *pentahelix* yang mensinergikan lima elemen, yaitu akademisi (*Academics-A*), pelaku usaha (*Business Actors-B*), anggota masyarakat (*Community-C*), pemerintah (*Government-G*) dan media (*Media-M*). Melalui sinergi kelima unsur tersebut di atas, diharapkan akan terjadi percepatan dalam melakukan revitalisasi dan restorasi kondisi DAS Citarum.

Masyarakat yang tinggal di DAS Citarum (*community*) sebagai salah satu elemen kolaborasi tersebut, ditengarai belum berperan optimal. Hal ini antara lain disoroti oleh Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan (Ashori, 2019).

Berkaitan dengan elemen pemerintah, Program Citarum Harum ditandai dengan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur, terutama dalam proses penegakan hukum terhadap para pelaku usaha yang membuang limbah industri ke Sungai Citarum. Hal tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2018, bahwa Tim DAS Citarum terdiri dari Pengarah dan Satuan Tugas (Satgas). Pada tingkat pengarah, kehadiran TNI ditunjukkan dengan adanya peran Panglima TNI sebagai salah satu anggota, sedangkan dalam tingkatan Satgas ditunjukkan dengan peran Panglima Kodam III/Siliwangi dan Panglima Kodam Jaya sebagai Wakil Komandan Bidang Penataan Ekosistem I dan II.

Sebagai tindak lanjut di lapangan, keterlibatan militer terwujud dalam pembagian Sungai Citarum, yang panjangnya 297 kilometer, dibagi ke dalam 22 sektor yang masing-masing dikomandani oleh seorang Komandan Sektor berpangkat Kolonel. Hal tersebut diamanatkan oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Permenko Maritim) Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 16 (2) yang berbunyi "*Komando Sektor tersebut dipimpin oleh perwira TNI berpangkat Kolonel sebagai Komandan Sektor dan bertugas melaksanakan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum di wilayah kerjanya masing-masing.*"

Secara struktural, keterkaitan peran militer (TNI) dengan masyarakat dalam Program Citarum Harum nampak pada elemen-elemen yang menjadi unsur dari Komando Sektor. Permenko Bidang Maritim Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 18 menjelaskan bahwa Komando Sektor terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat disini, terdiri dari individu, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan atau pemangku kepentingan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan sektor.

Keterkaitan peran militer (TNI) dengan elemen masyarakat dalam Program Citarum Harum terlihat pada susunan elemen-elemen yang menjadi unsur Komando Sektor. Permenko Bidang Maritim Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 18 menjelaskan, bahwa Komando Sektor terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat di sini, terdiri dari individu, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan atau pemangku kepentingan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan sektor. Keterlibatan elemen masyarakat dalam upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan kondisi DAS Citarum ditegaskan pada Bab VII Perpres Nomor 5 Tahun 2018.

Teori-teori tentang partisipasi masyarakat telah banyak dikemukakan oleh banyak pakar, salah satu diantaranya adalah Wilcox (1994). Pada prinsipnya Wilcox menyederhanakan tingkat partisipasi yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Arnstein (1969). Arnstein menyusun tingkat partisipasi masyarakat ke dalam 8 (delapan) tingkatan, yaitu tingkat partisipasi tunggal yang terdiri dari tahap manipulasi dan terapi, tingkat tiga derajat tokenisme yang terdiri dari tahap menginformasikan, tahap konsultasi, dan tahap menempatkan, serta tingkat tiga derajat kekuatan masyarakat yang terdiri dari kemitraan, kekuatan delegasi dan kontrol warga. Oleh Wilcox ke delapan tingkat partisipasi tersebut diringkas menjadi hanya lima tingkatan, yaitu tingkat informasi, tingkat konsultasi, tingkat keputusan bersama, tingkat kerja sama dan tingkat dukungan penuh untuk kepentingan komunitas.

Partisipasi masyarakat dalam implementasi suatu program pembangunan, berhubungan dengan banyak faktor yang dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. Pertama, faktor

internal yaitu hal-hal yang bersumber dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sendiri. Kedua, faktor eksternal yaitu hal-hal yang berasal dari luar masyarakat, baik yang bersumber dari program atau kebijakan itu sendiri, maupun yang berasal dari para pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan program tersebut.

Salah satu yang dapat dikategorikan sebagai faktor internal adalah modal sosial (*social capital*). Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (*resource*) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas yang menunjuk pada jejaring, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. Interaksi sosial ini dilakukan dalam waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan jejaring pola kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya, termasuk nilai dan norma yang mendasari hubungan sosial tersebut. Masyarakat dengan modal sosial yang tinggi mempunyai kecenderungan untuk mampu bekerja sama dan pada akhirnya akan mendorong tingkat partisipasi dalam berbagai program pembangunan.

Secara makro, keberadaan modal sosial dalam konsentrasi tinggi berdampak pada kinerja pendidikan, kesejahteraan anak, pengurangan kejahatan, tingkat pembunuhan, agresivitas, kesehatan, penggelapan pajak dan toleransi (Putnam 2001). Fukuyama (2001) menyatakan bahwa modal sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan mendorong kehidupan demokrasi yang dibutuhkan untuk stabilitas pemerintahan. *Case study* terhadap dua lingkungan kota di Hongkong yang dilakukan oleh Ng, (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan modal sosial berupa rasa keterikatan dan kebersamaan yang kuat, kreativitas dan jiwa kewirausahaan dan kemampuan menjembatani berbagai modal dari para pemangku kepentingan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam merevitalisasi pemukiman kumuh.

Ada beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur modal sosial, diantaranya adalah *Integrated Questionnaire for The Measurement of Social Capital (SC-IQ)* yang dikembangkan oleh Grootaert *et al* (2004) dengan penekanan fokus pada negara-negara berkembang. Model ini bertujuan memperoleh data kuantitatif pada berbagai dimensi modal sosial dengan unit analisis pada tingkat rumah tangga. Pada model ini, digunakan 6 (enam) indikator, yakni: 1) kelompok dan jejaring kerja;

2) kepercayaan dan solidaritas;3) aksi kolektif dan kerjasama;4) informasi dan komunikasi;5) kohesi dan inklusivitas sosial; 6) pemberdayaan dan tindakan politik.

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap partisipasi antara lain adalah peran *stakeholder* (Nurbaiti dan Bambang 2017, Oktavia dan Saharuddin 2013). Partisipasi masyarakat akan meningkat jika *stakeholder* beserta kebijakannya dapat diterima oleh kelompok masyarakat sasaran. Dalam Program Citarum Harum, salah satu pemangku kepentingan yang berperan sebagai ujung tombak adalah militer dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berperan sebagai Komando Sektor Satuan Tugas (Satgas). Dengan demikian persepsi yang baik dari masyarakat terhadap keterlibatan TNI dalam Program Citarum Harum diduga berhubungan dengan tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat partisipasi masyarakat, pengukuran terhadap modal sosial serta pengukuran tentang persepsi masyarakat terhadap kehadiran militer dalam Program Citarum Harum. Setelah itu penelitian ini juga bertujuan untuk memverifikasi secara empiris apakah ada hubungan antara ketiga variabel tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan untuk pengumpulan data dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, mulai pada bulan April sampai dengan September 2019, dengan lokasi penelitian di 5 (lima) desa/kelurahan yang dipilih secara purposif berdasarkan tipe permasalahan berbeda yang dihadapi oleh masing-masing desa/kelurahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

Metode penelitian utama yang digunakan adalah survei, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur dilengkapi dengan observasi dan wawancara. Unit analisis dalam penelitian ini adalah keluarga dengan responden kepala keluarga. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh rumah tangga/keluarga yang merupakan penduduk di 5 (lima) desa/kelurahan yang telah ditentukan secara purposif yang seluruhnya berjumlah 32.702 rumah tangga. Sampel ditentukan dengan cara sampling aksidental, yaitu kepala

keluarga (suami/istri) yang dapat ditemui pada saat pengumpulan data kuesioner dilakukan.

Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan Tabel Issac dan Michael dan diperoleh jumlah sampel responden sebanyak 270 keluarga. Selanjutnya jumlah tersebut dibagi secara proporsional berdasarkan persentase untuk masing-masing desa/kelurahan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Kuesioner yang telah disusun dikonsultasikan dengan tenaga ahli dan dilakukan uji coba pada 30 orang responden. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach's Alpha yang dihitung dengan program SPSS 20.0 dan hasilnya dibandingkan dengan R Tabel pada $DF = N-2$, probabilitas 0.05, dengan hasil 0.3.

Hasil uji validitas dan reliabilitas untuk partisipasi masyarakat diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.902 dan nilai Corrected Item-Total Correlation untuk semua item pertanyaan berada antara 0.347-0.889. Artinya instrumen yang disusun untuk mengukur tingkat partisipasi sangat reliable (semakin mendekati 1) dan memenuhi nilai validitas butir (diatas 0.3).

Hasil uji validitas dan reliabilitas untuk partisipasi masyarakat diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.902 dan nilai Corrected Item-Total Correlation untuk semua item pertanyaan berada antara 0.347-0.889. Artinya instrumen yang disusun untuk mengukur tingkat partisipasi sangat reliable (semakin mendekati 1) dan memenuhi nilai validitas butir (diatas 0.3).

Hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen modal sosial diperoleh nilai Cronbach's Alpha 0.694, sedangkan untuk validitas butir terdapat tiga item pertanyaan yang nilainya dibawah 0.3, yaitu MS3.1.16 (sub variabel kelompok dan jejaring kerja); MS3.2.18 (sub variabel kepercayaan dan solidaritas) dan MS3.4.26 (sub variabel kohesi dan inklusivitas sosial). Selanjutnya ketiga item pertanyaan tersebut dihilangkan dari kuesioner.

Sedangkan instrumen untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap keterlibatan militer, hasil uji validitas dan reliabilitas memberikan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.657 dan validitas butir untuk semua item pertanyaan berada antara nilai 0.357-0.561. Artinya instrumen untuk pengukuran persepsi masyarakat terhadap kehadiran militer cukup reliabel dan valid.

Tabel 1. Daftar Sampel Lokasi Penelitian

No	Klasifikasi Wilayah	Desa	Kecamatan/Kabupaten	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Deforestasi hutan/cemaran pertanian dan peternakan/longsor	Desa Resmitingal	Kertasari, Kab. Bandung	1.884	16
2	Cemaran limbah domestik	Kel. Cibabat	Cimahi Utara, Kota Cimahi	16.392	135
3	Perikanan darat/keramba apung	Desa Mekarmukti	Cihampelas, Kab. Bandung Barat	3.770	31
4	Sedimentasi dan banjir	Desa Majalaya	Majalaya, Kab. Bandung	4.333	36
5	Cemaran industry	Desa Rancaekek Wetan	Rancaekek, Kab. Bandung	6.323	52
	Jumlah			32.702	270

Instrumen pengujian untuk variabel partisipasi terdiri dari 10 pertanyaan, variabel modal sosial 14 pertanyaan dan persepsi masyarakat terhadap kehadiran militer sebanyak lima pertanyaan. Jawaban pertanyaan disusun secara bergradasi, dari sangat negatif sampai sangat positif menggunakan skala Likert 1-5.

Variabel yang digunakan terdiri dari atas dua variabel bebas (*independent variabel*) yaitu modal sosial (X1) dan Persepsi masyarakat tentang kehadiran militer (X2) serta satu variabel terikat (*dependent variabel*) yaitu partisipasi masyarakat (Y). Penjelasannya disajikan dalam Tabel 2. Tingkat partisipasi, modal sosial dan persepsi masyarakat terhadap kehadiran militer dianalisis dari hasil skor seluruh responden. Skor tersebut selanjutnya dibagi kedalam lima kategori, yaitu:

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

Interval antar kategori dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah kategori}}$$

$$\text{Skor tertinggi} = \text{Jumlah pertanyaan} \times \text{nilai Likert tertinggi} \times \text{jumlah responden}$$

$$\text{Skor terendah} = \text{Jumlah pertanyaan} \times \text{nilai Likert terendah} \times \text{jumlah responden}$$

Selanjutnya hubungan modal sosial dan persepsi masyarakat terhadap kehadiran militer di Citarum Harum dengan tingkat partisipasi masyarakat diuji dengan menggunakan uji korelasi *Rank Spearman*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

(a) Partisipasi Masyarakat

Instrumen pengujian terdiri dari 10 pertanyaan yang jawabannya disusun bergradasi dari sangat negatif sampai sangat positif menggunakan skala Likert 1-5. Terdiri dari dua pertanyaan masing-masing untuk tahap informasi, konsultasi dan pengambilan keputusan bersama; tiga pertanyaan untuk tahap melakukan tindakan bersama; dan satu pertanyaan untuk tahap penumbuhan inisiatif swakarsa. Hasil analisis terhadap tingkat partisipasi masyarakat disajikan dalam Tabel 3.

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Citarum Harum berada pada kategori rendah. Rendahnya tingkat partisipasi tersebut terdapat pada semua tahapan partisipasi, baik pada tahap informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, melakukan tindakan bersama, terlebih dalam tahap dukungan inisiatif swakarsa.

Artinya, selama ini informasi yang diterima oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan Program Citarum Harum di wilayah tempat tinggal mereka masih terbatas, masyarakat belum dilibatkan secara optimal dalam perencanaan, pembuatan keputusan serta belum dilibatkan dalam aksi bersama terkait kegiatan-kegiatan Citarum Harum yang dilaksanakan di wilayah mereka. Selain itu, pemerintah dalam hal ini Satuan Tugas Citarum Harum belum mampu sepenuhnya menumbuhkan inisiatif swakarsa dari masyarakat dalam rangka restorasi DAS Citarum.

Tabel 2. Definisi Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Rujukan
Modal Sosial (X_1), adalah kemampuan yang timbul sebagai hasil interaksi antara individu dalam masyarakat sehingga menghasilkan jaringan pola kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya, termasuk nilai dan norma yang mendasari hubungan sosial tersebut.	Kelompok dan jejaring kerja, adalah keterlibatan dalam berbagai organisasi/kelompok formal dan nonformal	<ul style="list-style-type: none"> - Keanggotaan pada Organisasi/kelompok formal/non formal - Tingkat aktivitas dalam organisasi - Jumlah teman akrab 	Grootaert, dkk (2004)
	Kepercayaan dan solidaritas adalah rasa percaya dan solidaritas kepada anggota komunitas secara umum dan kepada orang lain diluar komunitasnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepercayaan kepada tetangga - Kepercayaan kepada orang asing - Solidaritas terhadap komunitas 	
	Aksi kolektif dan kerjasama, adalah kemauan untuk bekerja bersama dalam menyelesaikan masalah bersama	<ul style="list-style-type: none"> - Intensitas mengikuti kegiatan komunitas - Sanksi terhadap anggota yang tidak berpartisipasi 	
	Kohesi dan inklusivitas sosial adalah persatuan dan kebersamaan komunitas	<ul style="list-style-type: none"> - Rasa kebersamaan - Identifikasi perbedaan yang berpotensi konflik - intensitas interaksi dengan anggota komunitas 	
Persepsi masyarakat tentang kehadiran militer (X_2)	- Peran Pelaksanaan Operasi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum		Permenko Bidang Maritim Nomor 8 Tahun 2018
Partisipasi masyarakat (Y), adalah partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam implementasi Program Citarum Harum	Informasi, adalah penyampaian informasi kepada masyarakat terkait Program Citarum Harum	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pengetahuan masyarakat tentang Program Citarum Harum - Kehadiran dalam kegiatan sosialisasi/rapat 	Wilcox (1994)
	Konsultasi, adalah penawaran opsi-opsi kegiatan dalam rangka implementasi Program Citarum Harum	<ul style="list-style-type: none"> - keikutsertaan masyarakat dalam memilih alternatif kegiatan yang ditawarkan Sektor 	
	Pembuatan keputusan bersama, adalah keadaan dimana masyarakat didorong untuk memberikan beberapa ide atau opsi tambahan dan kemudian ikut serta dalam pembuatan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ide-ide yang bersumber dari masyarakat - Masyarakat ikut serta dalam pengambilan keputusan 	
	Melakukan tindakan bersama, adalah berjalannya fungsi kemitraan yang melibatkan pengambilan keputusan bersama dan dilanjutkan dengan melakukan tindakan bersama	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat merancang kegiatan sendiri - Adanya peran pendukung dari pemerintah/Sektor 	
	Inisiatif swakarsa, adalah terciptanya komunitas yang mandiri dalam mendukung implementasi Program Citarum Harum	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komunitas yang dibentuk dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat 	

Tabel. 3 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Citarum Harum

NO	Tahapan	Klasifikasi					Skor	Kategori
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat rendah		
1.	Informasi	2.268,1-2.700	1.836,1-2.268	1.404,1-1.836	972,1-1.404	540-972	1.323	Rendah
2.	Konsultasi	2.268,1-2.700	1.836,1-2.268	1.404,1-1.836	972,1-1.404	540-972	983	Rendah
3.	Keputusan Bersama	2.268,1-2.700	1.836,1-2.268	1.404,1-1.836	972,1-1.404	540-972	1.370	Rendah
4.	Tindakan Bersama	3.402,1-4.050	2.754,1-3.402	2.106,1-2.754	1.458,1-2.106	810-1.458	1.599	Rendah
5.	Dukungan Inisiatif swakarsa	1.134,1-1.350	918,1-1.134	702,1-918	486,1-702	270-486	435	Sangat Rendah
	Total	11.340,1-13.500	9.180,1-11.340	7.020,1-9.180	4.860,1-7.020	2.700-4.860	5.710	Rendah

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4. Tabel Distribusi Frekuensi Tingkat Partisipasi Masyarakat

NO	Tahapan	Klasifikasi										Total	
		Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat rendah		F	%
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1.	Informasi	13	4.8	74	27.4	28	10.4	64	23.7	91	33.7	270	100
2.	Konsultasi	7	2.6	25	9.3	27	10.0	58	21.5	153	56.7	270	100
3.	Keputusan Bersama	52	19.3	53	19.6	29	10.7	16	5.9	120	44.4	270	100
4.	Tindakan Bersama	6	2.2	15	5.6	70	25.9	39	14.4	140	51.9	270	100
5.	Dukungan Inisiatif Swakarsa	1	0.4	30	11.1	0	0	70	25.9	169	62.6	270	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Jika memperhatikan sebaran capaian tingkat partisipasi masyarakat tersebut, diketahui bahwa persentase terbesar responden untuk keseluruhan tahapan partisipasi memang berada pada kategori rendah dan sangat rendah (lihat Tabel 4). Namun demikian, terdapat hal yang menarik bahwa pada tahap informasi dan pengambilan keputusan bersama terdapat persentase yang cukup besar untuk responden yang berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi, yaitu 32,2% untuk tahap pemberian informasi dan 38,9% untuk tahap pengambilan keputusan bersama.

Dalam kuesioner dilakukan pula identifikasi terhadap organisasi yang diikuti oleh masyarakat. Dari sepuluh bidang organisasi yang diidentifikasi dalam kuesioner, diperoleh

data bahwa sebagian besar responden tidak bergabung dalam organisasi apapun di desa/kelurahan mereka, sedangkan organisasi yang diikuti dan dianggap penting oleh sebagian responden lainnya adalah organisasi dibidang keagamaan (21,1%), bidang kepemudaan (12,6%) dan bidang lingkungan (12,2%). Organisasi bidang lainnya (olah raga, sosial, pendidikan, pertanian, kesehatan, seni budaya) hanya diikuti oleh kurang dari 10% responden.

Untuk menelusuri responden yang berkategori tinggi dan sangat tinggi pada tahap pemberian informasi dan pengambilan keputusan bersama, dilakukan analisis *crosstab* dengan organisasi yang diikuti dan dianggap penting oleh masyarakat (Tabel 5 dan 6).

Berdasarkan Tabel tersebut tampak bahwa masyarakat dengan tingkat partisipasi tinggi dan sangat tinggi pada tahap informasi dan pengambilan keputusan bersama ternyata didominasi oleh masyarakat yang merupakan anggota organisasi yang bergerak dibidang lingkungan. Menurut Wilcox (1994), tahap pemberian informasi merupakan langkah pertama yang paling penting untuk melegitimasi partisipasi serta dapat berdampak *multiple effect* bagi tahapan berikutnya. Tahapan ini biasanya bersifat satu arah hanya dari pelaksanaan kegiatan/program saja dan metode yang digunakan biasanya melalui pamflet, poster, spanduk, paparan dalam pertemuan-pertemuan, ataupun media berita lainnya. Hasil

observasi menunjukkan bahwa media-media informasi ini sangat terbatas ditemui dilapangan. Dari lima desa yang menjadi lokus penelitian, poster dan spanduk tentang Program Citarum Harum hanya ditemukan di Desa Resmitingal, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung yang merupakan wilayah dari Sektor 2.

Jika dicermati kembali kepada organisasi yang diikuti oleh responden, maka kita dapati fakta bahwa yang menghadiri (pada intensitas kadang-kadang, sering dan selalu) kegiatan-kegiatan pertemuan Program Citarum Harum adalah kelompok masyarakat yang menjadi anggota organisasi dibidang lingkungan (lihat Tabel 7).

Tabel 5. Crosstab Tingkat Partisipasi Tahap Informasi Dan Organisasi Yang Diikuti Masyarakat

NO	Organisasi yang diikuti	Partisipasi Tahap informasi										Total	
		Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat rendah			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Keagamaan	3	26.3	15	26.3	7	12.3	19	33.3	13	22.8	57	100
2.	Kepemudaan	0	0	15	42.9	5	14.3	6	17.1	9	25.7	35	100
3.	Lingkungan	7	21.2	15	45.5	6	18.2	4	12.1	1	3.0	33	100
4.	Bidang lain	1	2.2	9	20.0	5	11.1	14	31.1	16	35.6	45	100
5.	Tidak jadi anggota	2	2.0	20	20.0	5	5.0	21	21	52	52.0	100	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 6. Partisipasi Tahap Pengambilan Keputusan Bersama Dan Organisasi Yang Diikuti Masyarakat Crosstab Tingkat

NO	Organisasi yang diikuti	Partisipasi Tahap Pengambilan Keputusan Bersama										Total	
		Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat rendah			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Keagamaan	57	15.8	12	21.1	9	15.8	4	7.0	23	40.4	57	100
2.	Kepemudaan	35	20.0	12	34.4	3	8.6	2	5.7	11	31.4	35	100
3.	Lingkungan	33	39.4	10	30.3	4	12.1	2	6.1	4	12.1	33	100
4.	Bidang lain	45	20.0	6	13.3	6	13.3	4	8.9	20	44.4	45	100
5.	Tidak jadi anggota	14	14.0	13	13.0	7	7.0	4	4.0	62	62.0	100	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 7. Crosstab Kehadiran Dalam Rapat/Pertemuan Dan Organisasi Yang Diikuti Masyarakat

NO	Organisasi yang diikuti	Kehadiran dalam Rapat/Pertemuan					Total
		Tidak Pernah	Sangat Jarang	Kadang-kadang	Sering	Selalu	
1.	Keagamaan	32	4	17	1	3	57
2.	Kepemudaan	15	2	14	3	1	35
3.	Lingkungan	5	1	10	11	6	33
4.	Bidang lain	29	1	14	0	1	45
5.	Tidak jadi anggota	70	4	19	5	2	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Beberapa responden yang tidak pernah hadir memberikan penjelasan bahwa sepengetahuan mereka belum pernah ada pertemuan atau sosialisasi tentang Program Citarum Harum yang dilaksanakan di desa/kelurahan mereka. Sebagian lagi memberikan keterangan bahwa mereka tidak tahu tentang adanya pertemuan atau sosialisasi tersebut.

Keterangan-keterangan di atas memperkuat kesimpulan, bahwa upaya pelibatan masyarakat dalam implementasi Program Citarum Harum baru sampai pada kelompok atau kalangan tertentu, khususnya organisasi masyarakat di bidang lingkungan dan belum menyentuh masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam Program Citarum Harum ini masih merupakan partisipasi yang bersifat representatif atau partisipasi perwakilan.

Arnstein (1969) menyebut tahap pemberian informasi dan tahap konsultasi sebagai tingkat tokenisme, yaitu suatu tingkatan peran serta dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Dijelaskan pula bahwa jika partisipasi dibatasi hanya pada tingkat tokenisme ini, maka kecil kemungkinan ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Mengingat tahap informasi ini merupakan tahapan penting yang menjadi penopang bagi semua tingkat partisipasi lainnya, maka bisa diduga ketika masyarakat tidak mendapatkan penjelasan-penjelasan terkait Program Citarum Harum yang sedang berlangsung di daerahnya, tahapan-tahapan partisipasi berikutnya akan terpengaruh. Terbukti dengan rendahnya partisipasi masyarakat pada tahap konsultasi, pengambilan keputusan bersama, melakukan

aksi bersama dan tahap penumbuhan inisiatif swakarsa.

(b) Modal Sosial

Modal sosial masyarakat dalam pelaksanaan Program Citarum Harum pada penelitian ini terdiri atas empat sub variabel, yaitu kelompok dan jejaring kerja, kepercayaan dan solidaritas, aksi kolektif dan kerjasama serta kohesi dan inklusivitas sosial. Hasil analisis terhadap tingkat modal sosial masyarakat disajikan dalam Tabel 8.

Tabel tersebut menunjukkan, bahwa secara keseluruhan, tingkat modal sosial masyarakat di daerah pelaksanaan Program Citarum Harum berada pada kategori sedang. Jika memperhatikan rinciannya, maka kategori sedang ini terdistribusi pada sub variabel/indikator kelompok dan jejaring kerja, aksi kolektif dan kerjasama serta kohesi dan inklusivitas sosial. Sedangkan sub variabel/indikator kepercayaan dan solidaritas berada pada kategori tinggi.

Hal ini berarti, bahwa organisasi atau kelembagaan masyarakat pada daerah implementasi Program Citarum Harum telah tumbuh dan cukup mampu menjadi wadah bagi aktivitas masyarakat untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat bersama bagi masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, baik terhadap sesama warga maupun terhadap orang asing di luar komunitasnya, dapat menjadi pendorong bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Citarum Harum.

Kondisi ini dapat diterjemahkan bahwa masyarakat mempunyai kemampuan bekerjasama yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan dalam rangka restorasi Citarum.

(c) Persepsi Masyarakat terhadap Kehadiran Militer

Persepsi masyarakat terhadap kehadiran militer dalam Program Citarum Harum berada pada kategori sangat baik, dengan rincian dan skor sebagaimana disajikan dalam Tabel 9.

Artinya turut sertanya militer dalam upaya restorasi Citarum menurut masyarakat sangat

dibutuhkan terutama dalam penanganan sampah, limbah industry dan penataan lingkungan di sepanjang daerah aliran sungai. Selain itu, masyarakat juga merasa aman/nyaman dan tidak terintimidasi dalam beraktivitas, bahkan kehadiran militer dapat menumbuhkan motivasi bagi masyarakat untuk turut serta menjaga dan merawat Citarum.

Tabel.8 Tingkat Modal Sosial Masyarakat dalam Implementasi Program Citarum Harum

No	Sub Variabel	Klasifikasi					Skor	Kategori
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat rendah		
1.	Kelompok dan jejaring kerja	4536,1-5400	3672,1-4536	2808,1-3672	1944,1-2808	1080-1944	3512	Sedang
2.	Kepercayaan dan solidaritas	3402,1-4050	2754,1-3402	2106,1-2754	1458,1-2106	810-1458	3004	Tinggi
3.	Aksi kolektif dan kerjasama	3402,1-4050	2754,1-3402	2106,1-2754	1458,1-2106	810-1458	2730	Sedang
4.	Kohesi dan inklusivitas sosial	3402,1-4050	2754,1-3402	2106,1-2754	1458,1-2106	810-1458	2695	Sedang
	Total	15876,1-18900	12852,1-15876	9828,1-12852	6804,1-9828	3780-6804	11941	Sedang

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel. 9. Persepsi Masyarakat terhadap kehadiran militer dalam Implementasi Program Citarum Harum

Indikator	Klasifikasi					Skor	Kategori
	Sangat Baik	Baik	Sedang	Buruk	Sangat Buruk		
Persepsi terhadap penanganan sampah	1134,1-1350	918,1-1134	702,1-918	486,1-702	270-486	1222	Sangat Baik
Persepsi terhadap penanganan limbah industri						1231	Sangat Baik
Persepsi penataan bantaran sungai						1207	Sangat Baik
Persepsi terhadap keamanan/kenyamanan						1122	Baik
Persepsi terhadap penumbuhan motivasi						1193	Baik
Total	5670,1-6750	4590,1-5670	3510,1-4590	2430,1-3510	1350-2430	5975	Sangat Baik

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 10. Correlation Modal Sosial dan Partisipasi

		Partisipasi	Modal Sosial
Partisipasi	Correlation Coefficient	1.000	.339**
	Sig. (1-tailed)	.	.000
	N	270	270
Spearman's rho	Correlation Coefficient	.339**	1.000
	Sig. (1-tailed)	.000	.
	N	270	270

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Tabel 11. Correlation Partisipasi dan Persepsi Masyarakat terhadap Militer

		Persepsi Terhadap Militer	Partisipasi
Persepsi Terhadap Militer	Correlation Coefficient	1.000	.103*
	Sig. (1-tailed)	.	.046
	N	270	270
Spearman's rho	Correlation Coefficient	.103*	1.000
	Sig. (1-tailed)	.046	.
	N	270	270

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

(d) Modal Sosial dan Persepsi Terhadap Kehadiran Militer dengan Partisipasi Masyarakat

Uji korelasi dengan menggunakan Rank Spearman menunjukkan adanya hubungan yang positif antara modal sosial dan partisipasi masyarakat yang ditunjukkan dengan nilai Sig.(1-tailed) sebesar $0.000 < 0.01$ dan koefisien korelasi 0.339 (lihat Tabel 10). Dengan partisipasi masyarakat, menunjukkan adanya hubungan yang positif dengan nilai Sig.(1-tailed) sebesar $0.046 < 0.05$ dan koefisien korelasi 0.103.

Namun demikian, keduanya menunjukkan hubungan yang rendah terlihat dari nilai koefisien korelasi yang jauh dari 1. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fadillah (2016) bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara modal sosial dengan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Selain itu Jessica (2017) juga mendapati adanya hubungan antara modal sosial khususnya modal sosial *bridging* dan

modal sosial *bonding* dengan partisipasi masyarakat dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di KRPL Kenanga Kota Malang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi Program Citarum Harum berada pada kategori *rendah*.
2. Modal sosial masyarakat di wilayah implementasi Program Citarum Harum berada pada kategori *sedang*.
3. Persepsi masyarakat terhadap kehadiran militer berada pada kategori *sangat baik*.
4. Terdapat hubungan yang positif antara modal sosial dan partisipasi masyarakat serta antara persepsi masyarakat terhadap kehadiran militer dengan partisipasi.

Upaya perbaikan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Citarum Harum perlu dilakukan mulai dari tahap dasar yaitu

tahap pemberian informasi sehingga dapat menjadi landasan yang kuat dalam penumbuhan partisipasi pada tahap berikutnya (tahap konsultasi, pengambilan keputusan bersama, melakukan tindakan bersama dan penumbuhan inisiatif swakarsa) dengan memanfaatkan secara optimal modal sosial serta kepercayaan masyarakat terhadap keikutsertaan militer dalam program Citarum Harum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Jawa Barat yang telah membiayai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashori, Asep Yusuf. (2019). Walhi Minta Pemerintah Lebih Libatkan Masyarakat Dalam Program Citarum Harum. <http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=walhi-minta-pemerintah-lebih-libatkan-masyarakat-dalam-program-citarum-harum> [diakses 7/04/2019]
- Fadillah, Ahmad Zikri. (2016). Hubungan Modal Sosial Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat PHBM). Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Fukuyama, F. (2001). Social Capital, Civil Society and Development. *Third World Quarterly*, 22(1994), 7–20. <https://doi.org/10.1080/0143659002002254>
- Grootaert, et all. (2004). *Measuring Social Capital, An Integrated Questionnaire*. World Bank. Washington DC.
- Jessica, Maya Dina. (2017). Hubungan Modal Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Di Krpl Kenanga Kota Malang. Tesis. Universitas Brawijaya.
- Ng, M. K. (2018). Urban Renewal, Sense of Community and Social Capital: A Case Study of Two Neighbourhoods in Hong Kong. In J. Clark & V. Wright (Eds.), *Urban Renewal, Community and Participation* (pp. 45–70). Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-72311-2>
- Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. (2017). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) Factors Affecting Community Participation in the Implementation of Corporate Social Responsibility Program. *Proceeding Biology Education Conference*, 14(1), 224–228.
- Oktavia, Siska & Saharudin. 2013. Hubungan Peran Stakeholders Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*.1 (3). 231-246
- Putnam, R. D. (2001). Social Capital: Measurement and Consequences. *Canadian Journal of Policy Research*. <https://doi.org/10.1017/S1474746403001052>
- Wilcox, D. (1994). *The Guide to Effective Participation*. Delta Press, Brighton. Brighton: Delta Press, Brighton. [https://doi.org/10.1044/0161-1461\(2011/10-0014\)](https://doi.org/10.1044/0161-1461(2011/10-0014))